



*"Mewujudkan Sulawesi Utara yang
Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera".*



PROFIL BIRO HUKUM DAN HAM

**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
BIRO HUKUM DAN HAM
MANADO, JANUARI 2006**

BAB I PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah Propinsi Sulawesi Utara, maka Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas pokok, yaitu menyiapkan bahan koordinasi perumusan peraturan perundang – undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi hukum, yang di dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan terus berjenjang sampai kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara **“Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera”** yang dijabarkan kedalam misi antara lain supremasi hukum, dan Penegakan Hak Asasi Manusia, sangat diperlukan untuk mendorong Pengembangan budaya hukum khususnya untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government di daerah nyiur melambai Propinsi Sulawesi Utara.

Pengembangan budaya hukum yang diantaranya melalui pelayanan informasi – informasi hukum sangatlah membantu penyelenggara pemerintahan di daerah maupun masyarakat pada umumnya sebagai bahan informasi hukum untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Utara yang berbudaya hukum.

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang mengemban tugas sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dituntut untuk memberikan informasi – informasi penatalayanan hukum baik itu berupa Produk – produk hukum terbitan pemerintah pusat maupun produk – produk hukum terbitan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.

Penatalayanan hukum di lingkungan Pemerintah Sulawesi Utara di jabarkan kedalam program dan kegiatan – kegiatan strategis Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

BAB II

SELAYANG PANDANG BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Biro dan berada dibawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Utara, dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 29 yang mempunyai tugas :

menyiapkan bahan koordinasi perumusan peraturan perundang – undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
2. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah;
3. Melakukan Dokumentasi Hukum dan Publikasi / Desiminasi produk hukum;
4. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia.

B. VISI DAN MISI

Dalam rangka melaksanakan tugas – tugas dan tanggung jawab maka Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara menetapkan Visi dan Misi, Yaitu :

V I S I : TERWUJUDNYA SUPREMASI HUKUM MELALUI PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, BANTUAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG BERBUDAYA HUKUM TAHUN 2010.

Untuk mewujudkan Visi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara tersebut maka ditetapkan Misi, yaitu :

M I S I :

1. *MENINGKATKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG KONSISTEN;*
2. *MENINGKATKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM;*
3. *MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM;*
4. *MENINGKATKAN PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG HANDAL.*

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 atau 5 tahun.

Berdasarkan hal ini Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 kedepan.

Tujuan serta sasaran yang hendak dicapai oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara dalam Tahun 2006 - 2010, yaitu :

TUJUAN :

1. Mewujudkan kualitas aparatur yang professional dibidang hukum;
2. Mewujudkan penelitian / pengkajian produk hukum daerah yang efektif;
3. mewujudkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
4. Menggalakkan pemberdayaan bahan dokumentasi dan informasi hukum melalui Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum;
5. Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan HAM.

SASARAN :

1. Meningkatnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat;
2. meningkatnya kepastian hukum dalam penerapan semua peraturan perundang – undangan;
3. Terwujudnya produk hukum dan lembaga – lembaga penegak hukum dan pelaksana undang – undang yang konsisten meningkatkan rasa keadilan masyarakat dalam menerapkan peraturan perundang – undangan;
4. Meningkatnya kemampuan lembaga – lembaga penegak hukum, pelaksana undang – undang dan adanya peraturan Daerah yang memungkinkan hukum menjadi wahana bagi perubahan sosial;
5. Meningkatnya pelaksanaan dan perlindungan hak – hak asasi manusia;
6. Terwujudnya penegakan hukum dan peraturan secara transparan, akuntabel dan non-diskriminatif;
7. Hukum makin berfungsi dan berperan sebagai orde dan tertib sosial.

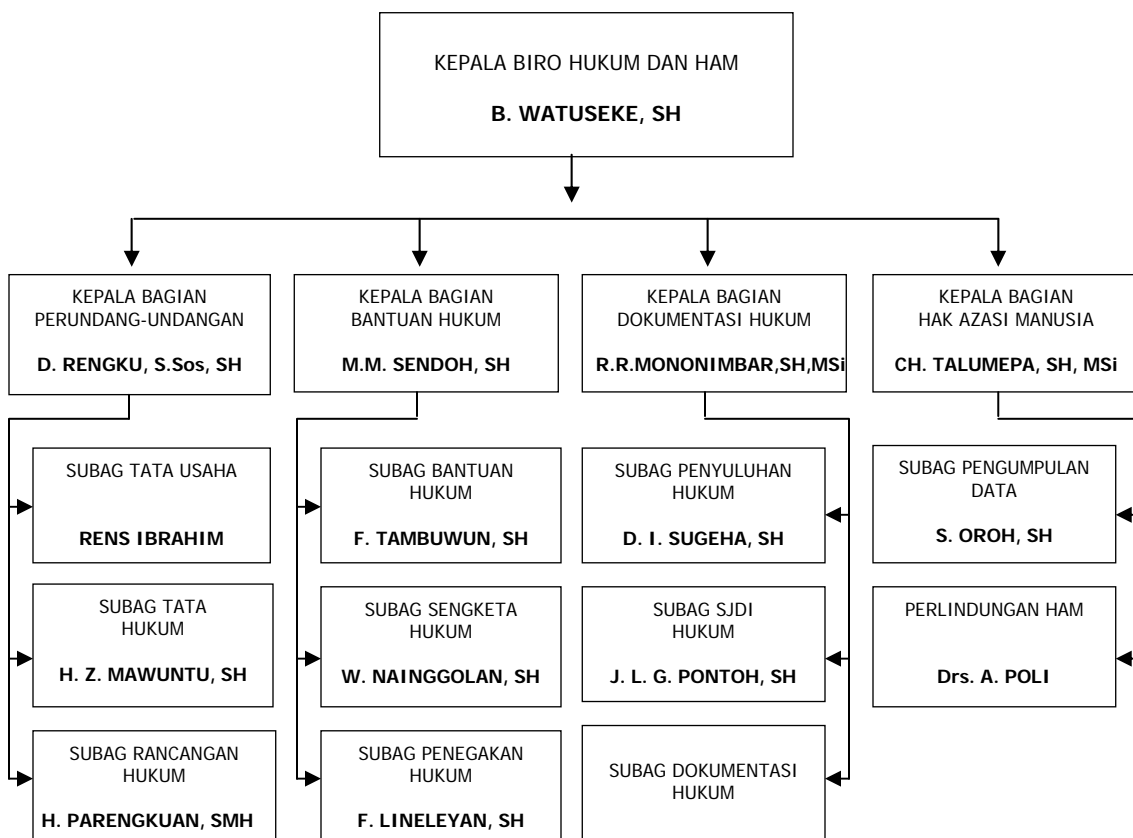
D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Kepala Biro Hukum dan HAM | Eselon II B |
| 2. Kepala Bagian Perundang – Undangan | Eselon III A |
| a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro; | Eselon IV A |
| b. Kepala Sub Bagian Tata Hukum; | Eselon IV A |
| c. Kepala Sub Bagian Rancangan Hukum; | Eselon IV A |

- 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum Eselon III A
 - a. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum; Eselon IV A
 - b. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum; Eselon IV A
 - c. Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum; Eselon IV A
- 4. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Eselon III A
 - a. Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum; Eselon IV A
 - b. Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan Informasi Hukum; Eselon IV A
 - c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum; Eselon IV A
- 5. Kepala Bagian Hak Asasi Manusia Eselon III A
 - a. Kepala Sub Bagian Data; Eselon IV A
 - b. Kepala Sub Bagian Perlindungan Hak Asasi Manusia ; Eselon IV A

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN HAM
(PERDA NOMOR 5 TAHUN 2003)**



E. PERSONALIA

Gambaran keadaan personalia Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara selang tahun 2006 seluruhnya berjumlah 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Menurut Esalon Jabatan :
 - a. Eselon II B 1 Orang
 - b. Eselon III A 4 Orang
 - c. Eselon IV A 10 Orang

Dibantu oleh sejumlah Staf 11 (sebelas) Orang yang tersebar di 4 (empat) Bagian.

-
2. Menurut Kepangkatan
 - a. Golongan IV 1 Orang
 - b. Golongan III 21 Orang
 - c. Golongan II 4 Orang

 3. Menurut tingkat pendidikan formal
 - a. Pasca Sarjana (S2) 2 Orang
 - b. Sarjana (S1) 14 Orang
 - c. Sarjana Muda 1 Orang
 - d. SLTA 9 Orang

 4. Menurut Diklat Struktural / Kepemimpinan
 - a. Diklat Pim II 1 Orang
 - b. Diklat Pim III 6 Orang
 - c. Diklat Pim IV 5 Orang

 5. Menurut Diklat Teknis
 - a. Penyidik PNS (PPNS) 3 Orang
 - b. Bintek Hukum 14 Orang
 - c. Kearsipan 2 Orang
 - d. Bendaharawan 4 Orang

**DAFTAR NAMA - NAMA PEGAWAI
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROP. SULUT**

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	ALAMAT/TELEPON
1	2	3	4
1. BOY WATUSEKE, SH 560 007 957	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Biro Hukum dan Ham	Winangun Batu Kota / 081356300079
2. MARSEL M. SENDOH, SH 010 217 573	Penata Tingkat I III/d	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Dendengan Dalam / 08124474662
3. RENGKU D. SUPIT, S.Sos, SH 560 008 710	Penata Tingkat I III/d	Kepala Bagian Perundang - undangan	Ranotana Lingk. IV Manado / 08124450689
4. RIKE MONONIMBAR, SH, Msi 560 011 218	Penata Tingkat I III/d	Kepala Bagian Dokumentasi Hukum	Karombasan Selatan Lingk. III / 08124451395
5. CHRISTIAN E. TALUMPEA, SH, Msi 560 015 340	Penata Tingkat I III/d	Kepala Bagian HAM	Karombasan Selatan Lingk. II Manado / 081356564427
6. DRS. ALEX POLI 560 006 232	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Perlindungan HAM	Perumahan PDK Malalayang I Manado/
7. HUBERTUS PARENGKUAN, SmH 560 008 243	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Rancangan Hukum	Desa Maumbi Dsn. IV Kec. Kalawat / 081340330811
8. HENDRIK MAWUNTU, SH 560 014 647	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Tata Hukum	Jl. Roring I Kel. Bahu Manado / 08152341929
9. FATMy A. LINELEJAN, SH 560 011 084	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum	Wanea Rike Manado / 081340836372
10. WILLEM P. NAINGGOLAN, SH 560 014 569	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum	Desa Kamangta Dsn.III Kab. Minahasa / 081340271059
11. SANDRA OROH, SH 560 014 796	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data	Ranotana
12. RENS IBRAHIM 560 008 548	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Perum Gub. Kairagi / 081356000025
13. FRANKY TAMBWUN, SH 560 014 270	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Sub Bagian bantuan Hukum	Perum Telkom Mas Kec. Kalawat / 081356124255
14. JOHAN L. G. PONTOH, SH 560 012 368	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan Hukum	Jl. Kembang Kec. Sario / 0431-862178
15. DUDY SUGEHA, SH 560 014 969	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum	Manado Permai Blok D No. 6 Manado / 081340052904
16. MARIE KINDANGEN 560 008 155	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Ranotana Lingk. VI Manado / 081356235599
17. JULIEN WUWUNGAN 560 008 653	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Tataaran Tondano
18. RISMAN BUMULO 560 011 223	Penata Muda III/a	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum	Perkamil / 085240703633
19. CLAUDE KAWATU, SH 560 017 967	Penata Muda III/a	Staf Sub Bagian Rancangan Hukum	Jl. Maruasei Komp. Kopergub Malalayang II/081340179103
20. CHANDRA RAWUNG, SH 560 020 191	Penata Muda III/a	Staf Sub Bagian Tata Hukum	Komp. Puskesmas Kec. Lik. Timur Minut / 081340331070
21. JEANE. E. RIEDEL 560 005 454	Penata Muda III/a	Staf Sub Bagian Penyuluhan Hukum	Ranotana Lingk. IV / 0431- 3349690
22. STEVENSON H. RORING, SH 560 023 271	Penata Muda, III/a	Staf Sub Bagian Perlindungan HAM	Kelurahan Ranotana Ling. IV Kota Manado/085240553347
23. OLLY FARIYANI 560 013 223	Pengatur Tingkat I II/d	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Karombasan Selatan Lingk. II / 081340049470
24. RINI A. ONIBALA 560 013 611	Pengatur Tingkat I II/d	Staf Sub Bagian Sengketa Hukum	Teling Manado / 081340888640
25. VIKTOR TUSANG 560 014 670	Pengatur II/c	Staf Sub Bagian Dokumentasi Hukum	Kelurahan Sindulang I
26. JOVITA PUSUNG 560 014 699	Pengatur II/c	Staf Sub Bagian Sistem Jaringan Hukum	Kinilow, Tomohon

F. SARANA PENUNJANG**DATA SARANA PENUNJANG BIRO HUKUM DAN HAM**

NO.	NAMA/JENIS BARANG	MERK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kijang Station Wagon	Toyota	1 bh	
2.	Meja Biro	-	8 bh	
3.	Meja ½ Biro	-	32 bh	
4.	Meja Rapat	-	1 bh	
5.	Meja Rapat Forum	-	8 bh	
6.	Kursi Putar Pendek	-	1 bh	
7.	Kursi Putar Tinggi	-	1 bh	
8.	Kursi Rapat	-	8 bh	
9.	Kursi Tinggi	-	12 bh	
10.	Pemotong Kertas	-	1 bh	
11.	Kursi Kerja	-	6 bh	
12.	Kursi ipat Chitose	-	6 bh	
13.	Kursi Tamu	-	2 Set	
14.	Mesin Ketik Elektronik	-	1 bh	RB
15.	Mesin Ketik	-	4 bh	2 RB
16.	Kipas Angin	-	1 bh	
17.	Bran Kas	-	1 bh	1 RR
18.	Komputer	-	6 bh	3 RR
19.	Meja Komputer	-	7 bh	
20.	Jam Dinding	-	1 bh	
21.	Head Proyektor	-	1 bh	
22.	Whibord	-	1 bh	
23.	Telepon	-	5 bh	
24.	Lemari Dorong Elite	-	5 bh	
25.	Lemari Buku Kaca	Broder	2 bh	
26.	Lemari Buku Elite	-	1 bh	
27.	Lemari Besi Arsip	-	7 bh	4 RB
28.	Filling Cabinet	-	14 bh	5 RB
29.	Lemari Buku Panjang/Kaca	-	4 bh	
30.	A C	-	2 bh	

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2005/2006

Sebagai penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan tugas – tugas diwujudkan dalam program – program strategis Tahun 2006 yaitu :

1. Program meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para eksekutif untuk memiliki kecakapan dalam mengimplementasikan supremasi hukum.

Kegiatan :

- Melaksanakan Diklat bagi PNS untuk menjadi aparat penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - Melaksanakan bimbingan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat penegak hukum Pemda Kabupaten/Kota
2. Program meningkatkan kepastian hukum dalam penerapan semua peraturan perundang-undangan.

Kegiatan :

- Melaksanakan penegakan hukum secara transparan, akuntabel dan tanpa pandang bulu bagi masyarakat atau badan hukum.
 - Melaksanakan dan menerapkan pemberian sanksi hukum secara adil, transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum.
 - Mengefektifkan kegiatan penyadaran hukum dan mendorong lahirnya partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan dan edukasi hukum.
 - Melaksanakan rapat periodik untuk mengkoordinasikan dan mengefektifkan pelaksanaan, penegakan dan pengembangan hukum.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, penegakan dan pengembangan budaya hukum.
3. Program Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Konsisten dalam meningkatkan Rasa Keadilan dalam Masyarakat.

Kegiatan :

- Mengkaji, merevisi, menyempurnakan dan membuat Perda dan Peraturan Gubernur yang konsisten dan berkesinambungan pada upaya meningkatkan rasa keadilan di dalam masyarakat.
- Melakukan evaluasi produk hukum Kabupaten/Kota.

4. Program Meningkatkan Kapasitas dan Mendorong Lembaga-Lembaga Penegak Hukum dan Pelaksana Undang-Undang agar Konsisten meningkatkan Rasa Keadilan Masyarakat dan menjadi Hukum sebagai Wahana Perubahan Sosial
Kegiatan :
 - Melakukan penguatan, meningkatkan dan mendorong lembaga-lembaga penegak hukum (capacity building) secara organisasi serta peningkatan sarana pendukungnya.
5. Program Meningkatkan Pelaksanaan Hak-Hak Azasi Manusia.
Kegiatan :
 - Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan di bidang penegakan HAM
 - Melakukan dan mendorong upaya-upaya capacity building institusi-institusi yang bergerak di bidang HAM
 - Mendorong terbentuknya jejaring organisasi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penegakan hukum dan HAM.
 - Mendorong dan mengapresiasi reward & punishment dari masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM.
 - Mendorong dan mengapresiasi terbentuknya jaringan masyarakat sadar hukum dan HAM.
 - Melakukan bimbingan teknis RANHAM.
 - Melaksanakan seminar tentang Pelanggaran HAM.
 - Peningkatan akses masyarakat dalam perlindungan hukum dari kegiatan malpraktek.
6. Meningkatkan Peran dan Fungsi Hukum sebagai Orde dan tertib Sosial Politik
Kegiatan :
 - Mendorong upaya-upaya institusi untuk meningkatkan peran dan fungsi hukum sebagai aturan dan tertib sosial politik.
 - Membuat peta kompetensi PNS di bidang penegakan hukum.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan ketaatan hukum meningkat, pelanggaran hukum menurun.
2. Keluhan terhadap penerapan hukum yang tidak konsisten berkurang.
3. Keluhan pengusaha dalam hal penegakan kepastian hukum berkurang.
4. Perda-Perda dan Peraturan Gubernur konsisten dan concern pada upaya meningkatkan rasa keadilan dalam masyarakat.
5. Keluhan mengenai rendahnya pemenuhan rasa keadilan berkurang.
6. Keluhan dalam penegakan hukum dan peraturan di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara berkurang.
7. Partisipasi warga masyarakat untuk memperjuangkan dan membela hak-hak azasi manusia terus meningkat.

8. Pelanggaran hak azasi manusia terus berkurang.
9. Lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak-hak azasi manusia berkembang.
10. Jejaring organisasi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penegakan hak azasi manusia berkembang.
11. Jaringan masyarakat sadar hukum dan HAM makin berkembang.
12. Jaringan masyarakat sadar Hukum dan HAM dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara efektif dan produktif.
13. Pelanggaran peraturan kepegawaian makin berkurang.
14. Tingkat kriminalitas menurun.
15. Pelanggaran hukum akibat keputusan-keputusan politik berkurang.

Program dan Kegiatan yang telah direalisasikan dalam penyelenggaraan tugas – tugas untuk tahun anggaran 2006, yaitu sebagai berikut :

- a. Program mewujudkan produk hukum daerah yang konsisten dalam meningkatkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan, Yaitu :

- Pengkajian produk hukum daerah;
- Pengajuan / pembahasan rancangan peraturan daerah ke DPRD;
- Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten / Kota.
- Penelitian Hukum adat;
- Penunjang administrasi perkantoran;
- Pengadaan alat kantor
- Penunjang kegiatan Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekda Propinsi Sulut.

- b. Program meningkatkan peran dan fungsi hukum sebagai orde dan tertib sosial politik.

Kegiatan yang dilaksanakan, Yaitu :

- Kemitraan dengan Tim Penggerak PKK.

- c. Program meningkatkan kapasitas dan mendorong lembaga-lembaga penegak hukum dan pelaksana Undang-undang agar konsisten meningkatkan rasa keadilan masyarakat dan menjadi hukum sebagai wahana perubahan sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan, Yaitu :

- Penanganan kasus-kasus Pemerintah Propinsi Sulut di Badan peradilan selaku Kuasa Hukum Gubernur;
- Penanganan kasus-kasus Pemerintah Propinsi di luar Badan peradilan;

- d. Program meningkatkan kepastian hukum dan penerapan semua peraturan perundang-undangan;

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Peningkatan Mutu Dokumentasi dan sistem Jaringan Informasi Hukum;
- Pengadaan buku-buku hukum/terbitan berkala;

- Penyuluhan hukum/sosialisasi dan rapat kerja;
 - Siswa Taat Hukum;
- e. Program meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para eksekutif untuk memiliki kecakapan dalam mengimplementasikan supremasi hukum;
- Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
- Peningkatan kemampuan aparatur di bidang hukum
- f. Program meningkatkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
- Pendataan HAM berat/ringan
 - Sosialisasi HAM di Sekolah
 - Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Berdasarkan program dan kegiatan dimaksud dapat direalisasikan dalam tiap-tiap bagian sebagai berikut :

1. BAGIAN PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan perundang – undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Bagian Perundang – undangan mempunyai tugas :

“Menyiapkan bahan koordinasi perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan / Instruksi Kepala Daerah, menelaah Peraturan Daerah dan Keputusan / Instruksi Kepala Daerah, melakukan fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten / Kota serta melakukan Tata Usaha Biro”.

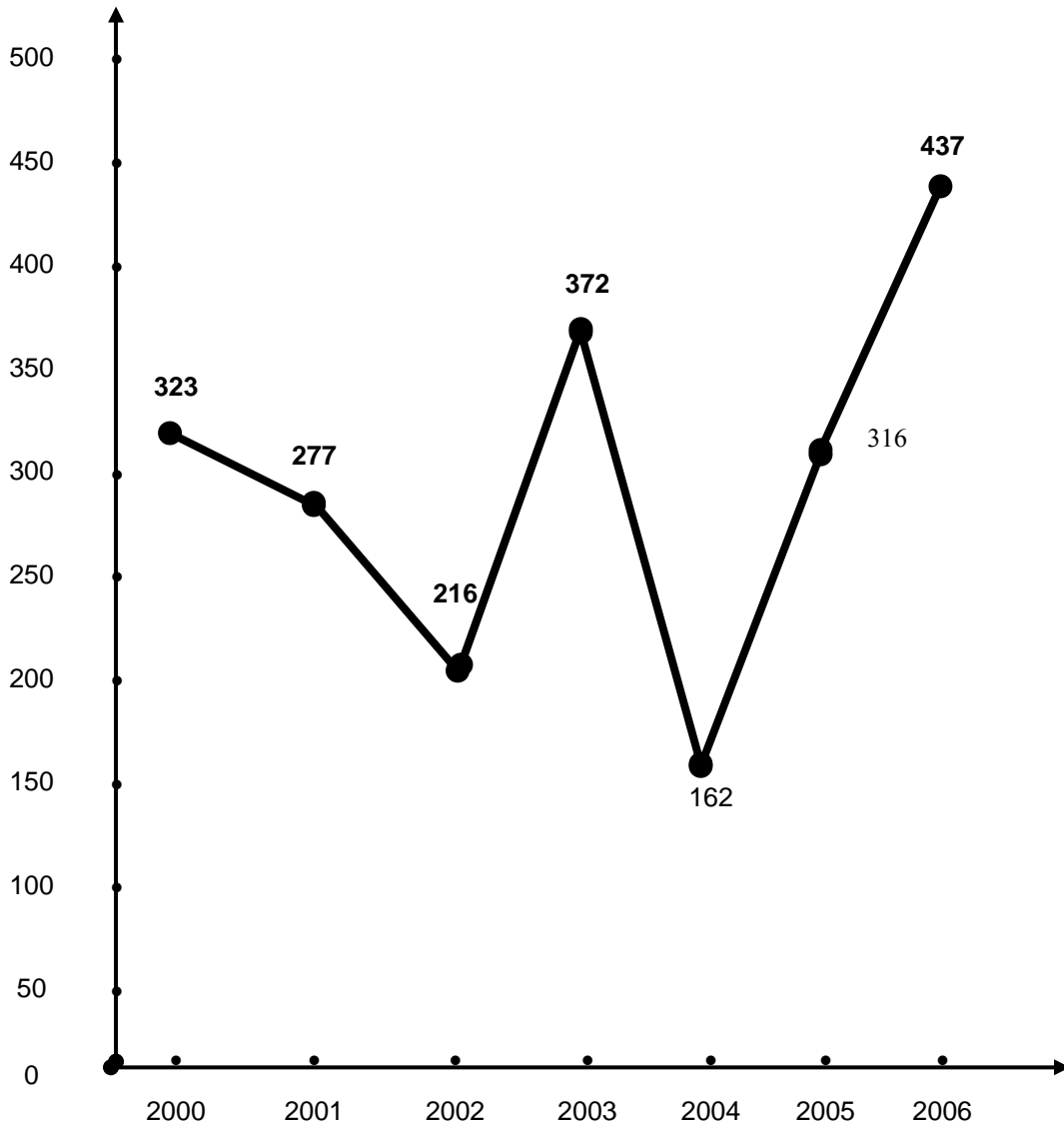
Didalam penyelenggaraan tugas tersebut yang didasarkan pada Program dan Kegiatan strategis Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Bagian Perundang – undangan telah mengkaji dan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya.

PRODUK PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2000 - 2006

PRODUK HUKUM	T A H U N							JMLH
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J E N I S								
PERATURAN DAERAH	18	11	16	39	12	6	24	126
PERATURAN GUBERNUR	-	-	-	-	-	33	61	94
KEPUTUSAN GUBERNUR	305	266	200	333	150	277	352	1883
TOTAL	323	277	216	372	162	316	437	2103

Melalui data peraturan daerah yang telah dikaji oleh Bagian Perundang – Undangan Biro Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum pada tabel tersebut diatas dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini :

**DIAGRAM PRODUK PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2000 - 2006**



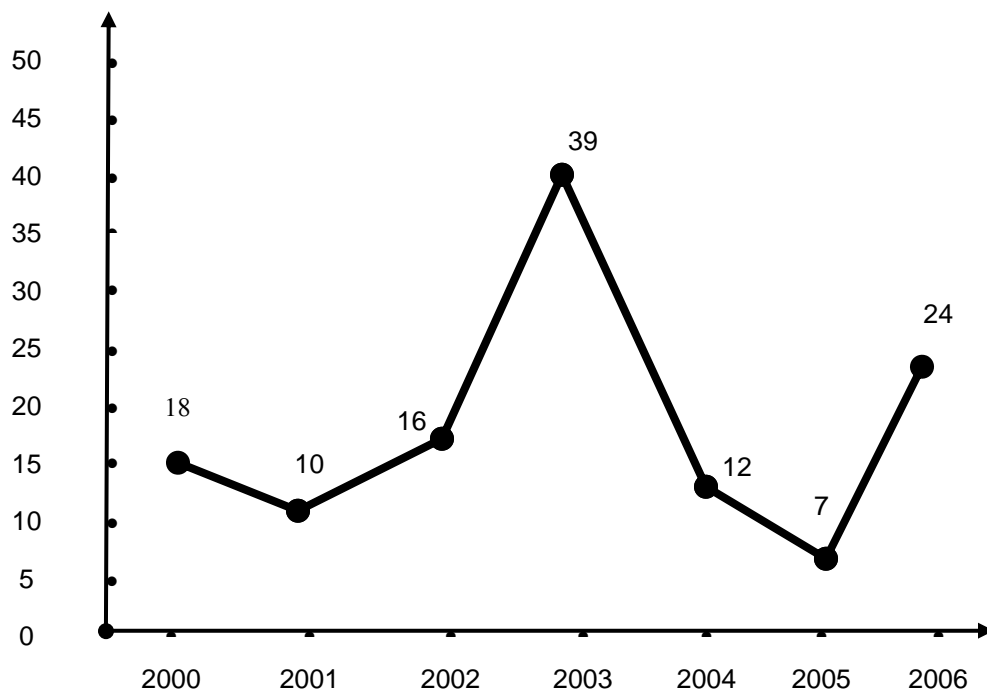
Pengumpulan dan pendataan produk – produk hukum Peraturan Daerah telah terinventarisir jenis – jenis Peraturan Daerah Sulawesi Utara, periode Tahun 2000 s/d Tahun 2006 yaitu :

**JENIS PERATURAN DAERAH
TAHUN 2000 - 2006**

PERDA	TAHUN							JMLH
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RETRIBUSI	10	-	1	3	5	2	1	22
PAJAK	-	-	7	-	-	-	3	10
ORGANISASI PERANGKAT	3	4	4	30	-	-	12	53
UMUM	5	6	4	6	7	5	8	41
TOTAL	18	10	16	39	12	7	24	126

Jenis – jenis Peraturan Daerah Sulawesi Utara yang telah didata menurut tahun ditetapkan yaitu diantaranya Peraturan Daerah tentang Retribusi, Pajak dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selang periode Tahun 2000 s/d Tahun 2006 seperti yang tergambar dibawah ini, yaitu :

**DIAGRAM PRODUK PERATURAN DAERAH
TAHUN 2000 - 2006**



Produk – produk hukum daerah Kabupaten / Kota yang telah dievaluasi dan menimbulkan masalah dalam penerapannya terdapat di 4 (empat) Daerah Kabupaten / Kota, yaitu :

**PERATURAN DAERAH KAB/KOTA YANG DIEVALUASI
TAHUN 2005**

KAB / KOTA	PERDA	TENTANG	SARAN	KET
1	2	3	4	5
1. BOLAANG MONGONDOW	1. No.21 Thn. 2001	Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya	Dibatalkan	4 Perda bermasalah
	2. No.22 Thn. 2001	Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya	Direvisi / dirubah	
	3. No.23 Thn. 2001	Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan	Direvisi / dirubah	
	4. No.24 Thn. 2001	Penyelenggaraan Kemetrollogian dan Pungutan Retribusi Atasnya	Dibatalkan	
2. BITUNG	1. No.9 Thn. 2000	Retribusi Perikanan di Kota Bitung	Direvisi / dirubah	2 Perda bermasalah
	2. No.10 Thn. 2001	Kewenangan dan Tarif Jenis Penerimaan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Bitung	Direvisi / dirubah	
3. KEPULAUAN TALAUD	1. No.12 Thn. 2004	Retribusi Pengendalian Perdagangan Hasil Bumi Antar Pulau	Dibatalkan	3 Perda bermasalah
	2. No.13 Thn. 2004	Retribusi Pengendalian Penyaluran Minyak Tanah	Dibatalkan	
	3. No.37 Thn. 2004	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan	Direvisi / dirubah	
4. MINAHASA	1. No.8 Thn. 1998	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Dibatalkan	2 Perda bermasalah
	2. No.26 Thn. 2000	Kewenangan dan Tarif Atas Jenis Penerimaan pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Minahasa	Direvisi / dirubah	

Untuk menjawab tuntutan pembangunan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, saat ini telah dikaji dan disusun 20 (dua puluh) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.

**DAFTAR RANPERDA PROPINSI SULAWESI UTARA
YANG TELAH DITETAPKAN TAHUN 2006**

NO	PERATURAN DAERAH		URAIAN	USULAN INSTANSI
	NOMOR / THN/TGL.	TENTANG		
1	2	3	4	5
1.	1 Tahun 2006 27 - 02 - 2006	APBD PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2006	Dalam rangka dasar hukum pengelolaan dan pertanggung jawaban APBD	Sekretariat Daerah
2.	2 Tahun 2006 12 - 07 - 2006	PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD 2005	Dalam rangka dasar hukum pengelolaan dan pertanggung jawaban APBD	Sekretariat Daerah
3.	3 Tahun 2006 11 - 10 - 2006	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006	Dalam rangka dasar hukum pengelolaan dan pertanggung jawaban APBD	Sekretariat Daerah
4.	4 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman, sehingga perlu adanya penggabungan Dinas Prasarana dan Permukiman Propinsi Sulawesi Utara dan Dinas Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Utara menjadi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Utara	Sekretariat Daerah
5.	5 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk meningkatkan pember- dayaan generasi muda dan olahraga serta menumbuh- kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemuda dan olahraga di Propinsi Sulawesi Utara, sehingga perlu dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara	Sekretariat Daerah
6.	6 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan produk hukum daerah	Sekretariat Daerah
7.	7 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	KANTOR PELAYANAN SATU PINTU	Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada penanam modal (investor) atau pelaku usaha secara maksimal	Sekretariat Daerah
8.	8 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sebagai pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006	Sekretariat Daerah
9.	9 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA	Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah	Sekretariat Daerah
10.	10 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROPINSI SULAWESI UTARA	Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Sekretariat Daerah
11.	11 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	SEMPADAN SUMBER AIR	Untuk keseimbangan antara kebutuhan dan pemeliharaan lingkungan hidup	Dinas Sumber Daya Air
12.	12 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara	Sekretariat Daerah
13.	13 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara.	Dinas Perikanan dan Kelautan
14.	14 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk efisiensi serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara dan tidak menambah jabatan struktural	Dinas Pertanian dan Peternakan
15.	15 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk efisiensi dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara	Dinas Komunikasi dan informasi
16.	16 Tahun 2006 12 - 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG DINAS KESEHATAN	Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara	Dinas Kesehatan

17.	17 Tahun 2006 12 – 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara	Dinas Perhubungan
18.	18 Tahun 2006 12 – 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG DINAS PENDAPATAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara	Dinas Pendapatan
19.	19 Tahun 2006 12 – 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI UTARA	Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara	Badan Kesatuan Bangsa
20.	20 Tahun 2006 12 – 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah	Dinas Pendapatan
21.	21 Tahun 2006 12 – 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA NO. 4 TAHUN 2002 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah	Dinas Pendapatan
22.	22 Tahun 2006 12 – 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA NO. 5 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah	Dinas Pendapatan
23.	23 Tahun 2006 12 – 12 - 2006	PERUBAHAN PERTAMA PERDA NO. 13 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PERIKANAN	Untuk menyesuaikan dengan petunjuk Menteri Keuangan melalui surat No. S- 056/MK.10/2006 tanggal 17 April 2006 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah dan Surat Mendagri Nomor 188.341/2130/SJ tanggal 1	Dinas Pendapatan
24.	24 Tahun 2006 29 - 12 – 2006	APBD TAHUN ANGGARAN 2007	Dalam rangka dasar hukum pengelolaan dan pertanggung jawaban APBD	Sekretariat Daerah

Bagian Perundang – undangan merupakan Tim Evaluasi / Pengkajian penyusunan produk – produk hukum. Produk – produk hukum Kabupaten / Kota diantaranya Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluas, yaitu :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB/KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2006

KAB / KOTA	TENTANG	SARAN	KET
1	2	3	4
1. BOLAANG MONGONDOW	1.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
2. SANGIHE	2.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
	2.2 Retribusi ketenagakerjaan	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
3. KEPULAUAN TALAUD	3.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
4. MINAHASA SELATAN	4.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
5. MINAHASA UTARA	5.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
6. MINAHASA	6.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
	6.2 Tata Cara Pencalonan Pemilihan, pelantikan dan Pembenhentian Hukum Tua	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	
7. TOMOHON	7.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
8. BITUNG	8.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	
9. MANADO	9.1 APBD Tahun 2006	Disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	

2. BAGIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

“Menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah”.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bagian Bantuan Hukum memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kedinasan.

Sengketa hukum yang sering terjadi antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dengan masyarakat pada umumnya dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, hal ini dapat dilihat dari sengketa hukum yang ditangani oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

**DATA PERKARA / KASUS
TAHUN 2006**

JENIS KASUS / OBJEK SENGKETA	PERADILAN		JMLH KASUS	DALAM PROSES							PUTUSAN
	PN	PTUN		PN	PTUN	BANDING		MA		JMLH	
			PT			PTUN	KASASI	PK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. TANAH	19	2	21	3	--	3	--	10	1	17	4
2. SK. PAW GUBERNUR	3	7	10	1	--	--	2	1	1	5	5
3. SUKSESI KEPALA DAERAH	1	2	3	1	--	--	--	1	--	2	1
4. CLASS ACTION	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	2
5. KEPUTUSAN KPU	--	1	1	--	--	--	--	1	--	1	--
TOTAL	25	12	37	5	--	3	2	13	2	25	12

Penegakan hukum terhadap anggota DPRD Kabupaten / Kota dengan dikeluarkannya Surat Isin Penyidikan (SIP) diseluruh Kabupaten / Kota Propinsi Sulawesi Utara yaitu :

**DAFTAR SURAT ISIN PENYIDIKAN (SIP)
ANGGOTA DPRD KAB / KOTA SULAWESI UTARA**

KAB / KOTA	TAHUN							JMLH
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. KOTA MANADO	-	-	1/1	1/1	4/13	7/45	-	13 SIP/ 60 Org
2. KOTA BITUNG	-	-	5/23	-	-	7/7	1/1	13 SIP/ 31 Org
3. KOTA TOMOHON	-	-	-	-	-	1/1	2/2	3 SIP/ 3 Org
4. KAB. MINAHASA	-	-	3/3	2/2	1/1	2/2	1/1	9 SIP/ 9 Org
5. KAB. MINAHASA SELATAN	-	-	-	-	1/1	1/1	-	2 SIP/ 2 Org
6. KAB. MINAHASA UTARA	-	-	-	-	1/1	1/1	1/1	3 SIP/ 3 Org
7. KAB. BOLAANG MONGONDOW	-	-	1/1	3/3	3/5	2/2	3/6	12 SIP/ 17 Org
8. KAB. SANGIHE	1/1	-	1/1	-	3/14	1/2	-	6 SIP/ 18 Org
9. KAB. TALAUD	-	-	-	-	1/1	-	1/11	2 SIP/ 12 Org
TOTAL	1/1	-	11/29	6/6	14/36	22/61	9/22	66 SIP/ 158 Org

3. BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM

Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

“Melakukan dokumentasi dan publikasi produk – produk hukum, menerbitkan lembaran daerah serta mengatur desiminasi / penyebarluasan produk hukum”

Peningkatan Mutu Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu Program Strategis dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyebarluasan produk – produk hukum baik pusat maupun daerah sehingga sangatlah penting di dalam menunjang pembangunan hukum Propinsi Sulawesi Utara. Bahwa dalam implementasi produk – produk hukum daerah Bagian dokumentasi hukum melakukan pengundangan, menerbitkan himpunan lembaran daerah dan lembaran daerah lepas, berita daerah serta warta informasi peraturan perundang – undangan.

DATA INVENTARISASI PERATURAN PADA BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT PROPINSI SULAWESI UTARA

J E N I S		T A H U N			J U M L A H
		1945 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2006	
1	2	3	4	5	6
1.	UNDANG-UNDANG	1.085	202	156	1.443
2.	PERATURAN PEMERINTAH	2.194	769	384	3.347
3.	KEPUTUSAN PRESIDEN	762	1.088	492	2.342
4.	INSTRUKSI PRESIDEN	201	88	39	328
5.	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	69	43	48	160
6.	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI	1.544	1.254	685	3.483
7.	PERATURAN DAERAH	148	118	107	373
8.	PERATURAN GUBERNUR	-	-	104	104
9.	KEPUTUSAN GUBERNUR	2.021	3.172	1.793	6.986
10.	INSTRUKSI GUBERNUR	-	46	4	50
TOTAL		8.024	6.780	3.812	18.616

Selain data tersebut diatas Bagian Dokumentasi Hukum memiliki data tahun 2006 sebagai berikut :

- a. Data Warta Informasi Peraturan Perundang – undangan yang masuk sebanyak 316 Exemplar;
- b. Pencari informasi peraturan perundang – undangan sebanyak 400 Orang;
- c. Surat – surat kedinasan / buku informasi berjumlah sebanyak 124 buah.

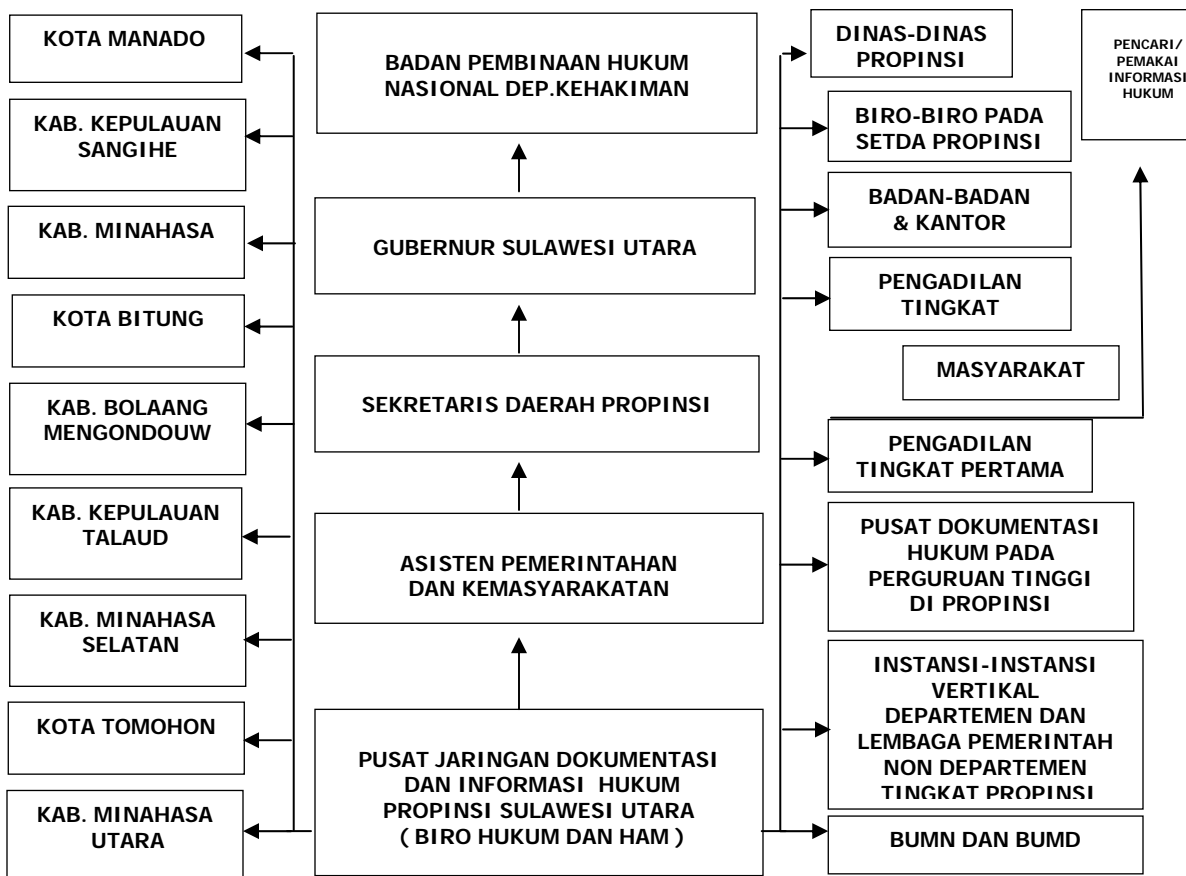
Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang – undangan dan Dokumentasi Hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan penyediaan sarana pembangunan dibidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang – undangan dan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan. Pusat jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman. Anggota jaringan adalah Biro Hukum dan atau perundang – undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang – undangan yang ada di Departemen dan Non Departemen di Jakarta.

Pemerintah Daerah Propinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah. Untuk lebih mengenal dan mengetahui mekanisme Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Propinsi Sulawesi Utara dapat di lihat dalam gambar berikut ini.

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROPINSI SULAWESI UTARA
(KEPRES NO. 91 THN 1999)**



KETERANGAN : Garis hubungan timbal balik antar pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Propinsi Sulut (Biro Hukum dan Ham) dan Instansi terkait lainnya dengan Bagian Hukum dan atau Perundang-Undangan atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas dalam Bidang/Seksi/Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Pemda Kab/Kota, Instansi-Instansi Tingkat Propinsi, serta masyarakat. Sosialisasi / Penyuluhan hukum dalam pemasyarakatan peraturan perundang – undangan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta siswa SD, SMP dan SMA/Sederajat sangatlah penting dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum. Kegiatan Strategis yang dilakukan untuk Tahun 2006 telah dilaksanakan Penyuluhan hukum terpadu Siswa Taat Hukum (SITAHU) Propinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan instansi terkait, antara lain Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Departemen Hukum dan HAM, DPRD di Propinsi Sulawesi Utara. Kegiatan SITAHU ini telah dilaksanakan disetiap Kabupaten/Kota dengan data sebagai berikut :

**DATA PROGRAM DAN KEGIATAN SITAHU
PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2005 - 2006**

KAB / KOTA	S I S W A			JMLH	KET
	SD	SMP	SLTA		
1	2	3	4	5	6
1. KOTA MANADO	300	400	600	1.300	
2. KOTA BITUNG	200	200	350	550	
3. KOTA TOMOHON	250	250	300	800	
4. KABUPATEN MINAHASA	150	150	200	300	
5. KABUPATEN MINSEL	100	100	100	600	
6. KABUPATEN MINUT	100	100	100	300	
7. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW		-		500	
8. KABUPATEN SAGIHE	150	150	200	500	
9. KABUPATEN TALAUD		-			
T O T A L	1.250	1.350	1.850	4.850	

4. BAGIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bagian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas :

“Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk umum dibidang Hak Asasi Manusia”

Terlaksananya penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara dalam Pembangunan Hukum di Propinsi Sulawesi Utara. Berkaitan dengan hal tersebut untuk meningkatkan pemahaman terhadap upaya Perlindungan HAM bagi masyarakat Sulawesi Utara, sekaligus penyamaan persepsi dalam pelaksanaan HAM, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara bersama dengan instansi terkait lainnya telah melakukan kegiatan – kegiatan strategis antara lain yaitu dengan mengadakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

**DATA KASUS PELANGGARAN HAM PEREMPUAN DAN ANAK
PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2001 S/D 2006**

PELANGGARAN HAM	TAHUN						JMLH
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. TRAFIKING	-	56	20	13	15	10	108
2. PENCULIKAN	-	-	-	-	1	-	1
3. HUBUNGAN SEKSUAL DILUAR NIKAH (ZINAH)	3	46	79	-	96	106	330
4. PERCABULAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	4	50	97	53	36	166	406
5. PERKOSAAN	-	6	3	10	18	80	117
6. MEMBAWA LARI ANAK PEREMPUAN BELUM DEWASA	-	10	5	25	19	136	195
TOTAL	7	168	204	101	185	498	1.157

Dari keseluruhan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan seperti tersebut diatas, telah digunakan biaya sebesar Rp. 2.349.399.500,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian pembiayaan perkegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	A N G G A R A N (RP)	REALISASI	
			FISIK	KEUANGAN (RP)
1	Pengkajian Produk Hukum Daerah, Pengajuan Ranperda ke DPRD dan Pembinaan/Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	731.500.000,-	100	731.500.000,-
2	Penelitian Hukum Adat, Penunjang Kegiatan Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Kemitraan dengan TP-PKK.	174.000.000,-	100	174.000.000,-
3	Penunjang Administrasi Perkantoran, Pengadaan Alat kantor.	106.500.000,-	100	106.500.000,-
4.	Pendataan HAM Berat/Ringan, Sosialisasi HAM dan RANHAM	192.500.000,-	100	192.500.000,-
5.	Penanganan Kasus Pemerintah Propinsi Sulut di Badan Peradilan, dan diluar Peradilan.	362.500.000,-	100	362.500.000,-
6.	Peningkatan Mutu Dokumentasi Hukum dan Sisten Jaringan Dokumentasi Hukum, Pengadaan Buku Hkum/Terbitan Berkala dan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi serta Rapat Kerja.	283.000.000,-	99.61	282.399.500
7.	Siswa Taat Hukum (SITAHU)	400.000.000,-	100	400.000.000,-
8.	Peningkatan Kemampuan Aparatur di Bidang Hukum	100.000.000,-	100	100.000.000,-
	J U M L A H	2.349.399.500	99.95	99,96

B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2007

Gambaran umum rencana program dan kegiatan Tahun 2007 Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang didukung sebanyak 5 (lima) sasaran perlu dirumuskan beberapa kebijakan strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan kebijakan strategis Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara, yaitu :

1. Penerapan peraturan dan perundang – undangan yang memberi kepastian hukum dan keadilan serta mendorong lahirnya produk hukum yang menjadi wahana perubahan sosial;
2. Meningkatkan jaminan pelaksanaan hak – hak asasi manusia;
3. Peningkatan fungsi dan peran hukum untuk menjadi orde dan tertib sosial, kestabilan ekonomi dan penegakan supremasi hukum dalam segala aspeknya;
4. Melengkapi peraturan – peraturan yang ada dimana selama ini belum lengkap terutama yang mengatur tata kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Memperhatikan kebijakan strategis tersebut diatas maka program induk pembinaan hukum Biro hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2007 yaitu, **“Penataan Peraturan Perundang – Undangan”** dengan kegiatan serta dukungan dana sebagai berikut :

a.	Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Rp. 33.100.000.-
b.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	Rp. 151.450.000.-
c.	Koordinasi kerjasama peraturan perundang – undangan;	Rp. 795.500.000.-
d.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan;	Rp. 650.800.000.-
e.	Publikasi peraturan perundang – undangan;	Rp. 709.400.000.-
f.	Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap perundang – undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang – undangan daerah.	Rp. 494.950.000.-
J U M L A H		Rp. 2.835.200.000.-

Khusus peningkatan kualitas produk perundang-undangan program Biro Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2007 juga ditunjang dengan sedikit pendanaan dari dana dekonsentrasi melalui Departemen Dalam Negeri .

Sehubungan dengan program dan kegiatan strategis tersebut diatas diuraikan kedalam tugas dan fungsi pada masing – masing Bagian.

Adapun uraian kegiatan pada masing – masing program Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

- a. Bagian Perundang – Undangan.

Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan :

1. _Pengkajian Produk Hukum Daerah Prop.Sulut;
2. Pengajuan / Pembahasan Ranperda Prop. Sulawesi Utara di DPRD;
3. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

K e g i a t a n :

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan;
3. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

K e g i a t a n :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

b. Bagian Bantuan Hukum.

Program Koordinasi kerjasama peraturan perundang – undangan.Kegiatan :

1. Bantuan hukum
2. Penanganan kasus
3. Penegakan hukum
4. Forum Komunikasi Hukum

c. Bagian Dokumentasi Hukum.

Program Publikasi Peraturan Perundang – Undangan .Kegiatan :

1. Penyuluhan Hukum;
2. Siswa Taat Hukum;
3. Pemeliharaan Rutin Perpustakaan/Berkala Produk-Produk Hukum;
4. Kerjasama Pertukaran Informasi Jaringan Dokumentasi Hukum;
5. Penyusunan Progremer JDI Hukum;
- 6 Penyusunan Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Profil Biro Hukum dan HAM;
7. Penerbitan Peraturan Perundang-undangan;

d. Bagian Hak Asasi Manusia (HAM)

Program Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap peraturan – undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang – undangan daerah.Kegiatan :

1. Orientasi Hukum penyelesaian masalah HAM;
2. Perlindungan HAM;
3. Pengumpulan/Inventarisasi Data HAM;
4. Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).

Dari berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tersebut diatas maka kegiatan strategis yang merupakan prioritas adalah :

1. Pengkajian produk hukum Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan pembinaan/ pengawasan produk hukum daerah Kabupaten / Kota;
2. Peningkatan kesadaran hukum dikalangan aparatur Pemerintah serta Penganan kasus;
3. Peningkatan kualitas jaringan dokumentasi dan informasi hukum
4. Peningkatan koordinasi penyelesaian masalah HAM di Propinsi Sulawesi Utara.

BAB IV

PENUTUP

Profil Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara ini diharapkan kiranya dapat memberikan informasi-informasi / pengenalan dan kejelasan kepada khalayak umum yang ingin mengetahui Potret Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara dalam penatalayanan hukum, terutama di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Materi penyusunan Profil Biro Hukum dan HAM adalah bagian dari upaya Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menunjang visi Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Demikian Profil Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara untuk digunakan seperlunya.